Analisis Ekonomi Wilayah Dan Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso

by Jurnal Geografika

Submission date: 11-Feb-2022 05:19PM (UTC+0700)
Submission ID: 1759662454
File name: 4779-12717-1-ED.docx (58.23K)
Word count: 3246
Character count: 21677

Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)
Vol. X, No. X, Juni-Desember 20XX.
©2020 Program Studi S1 Geografi, FISIP ULM.

Jurnal
Geografika
(Geografi Lingkungan Lahan Basah)

Analisis Ekonomi Wilayah dan Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso

Nor AufaAzizah[1], Rosalina Kumalawati[2], Ellyn Normelani[3], Ahmad Alim Bachri[4]
[1]Mahasiswa Program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
[2, 3]Program Studi Geografi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
[4]Program Studi Ilmu Manajemen, FEB, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin
e-mail addresses: 2010416220020@mhs.ulm.ac.id

Corresponding author: 2010416220020@mhs.ulm.ac.id
©2021 Program Studi S1 Geografi, FISIP ULM.

Abstrak: Negara berkembang dapat mewujudkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dengan melakukan pembangunan. Pembangunan yang kerap kali dilangsungkan oleh negara berkembang adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya pendapatan total, yaitu terjadinya peristiwa pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan memperkirakan penambahan jumlah penduduk, pergantian fundamental dalam susunan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Perkembangan ekonomi adalah salah satu petunjuk dala kemajuan keuangan yang harus terlihat melalui peningkatan pembayaran teritorial asli selama jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penanda yang signifikan untuk menentukan keadaan keuangan dalam ruang dalam jangka waktu tertentu, baik berdasarkan biaya saat ini maupun berdasarkan biaya tetap. Sebagian besar tingkat perkembangan ekonomi di Kabupaten Bondowoso adalah relatif meningkat meskipun memiliki pendapatan perkapita yang tergolong sedang. Sektor industri yang sekaligus penyumbang pendapatan terbesar di Kabupaten Bondowoso perlu dikembangkan dan dikelola kembali agar dapat memenuhi capaian dan sasaran pembangunan ekonomi.

Kata Kunci: pembangunan, ekonomi, evaluasi, Kabupaten Bondowoso

Abstract: *Developing countries can realize better conditions than before by carrying out development. Development that is often carried out by developing countries is economic development. Economic development is the process of increasing total income, namely the occurrence of economic growth events in a country by estimating the increase in population, fundamental changes in the composition of the economy and income distribution. Economic development is one of the clues in financial progress that must be seen through the increase in original territorial payments over a certain period of time. Gross Regional Domestic Product (GDP) is a significant marker to determine the financial condition in space within a certain period of time, both based on current costs and based on fixed costs. Most of the levels of economic development in Bondowoso Regency are relatively increasing despite having a moderate per capita income. The industrial sector, which is also the largest income contributor in Bondowoso Regency, needs to be developed and managed again in order to meet the achievements and targets of economic development.*

Keywords: *development, economy, evaluation, Bondowoso Regency*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah bentuk nyata dari tugas pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemajuan daerah dan mencukupi kebutuhan penduduk (Suryahani & Murni., 2006). Pelaksanaan pembangunan memerlukan peninjauan atas pemenuhan kebutuhan penduduk yang menjadi fokus utama (Azizah *et al*., 2021) Indikator utama berhasilnya suatu pembangunan adalah dengan memperkirakan kapasitas kebutuhan penduduk agar dapat terpenuhi secara langsung ataupun tidak langsung. Pemenuhan kebutuhan masyarakat antara pusat dan daerah sudah ada alokasi dana untuk mendukung pembangunan yang ada (Nuryadin & Suharsih., 2017).

Indonesia adalah negara kepulauan yang dapat berupaya mewujudkan pembangunan nasional dengan wilayah yang terbagi atas 34 provinsi, 410 kabupaten dan 98 kota. Setiap provinsi, kabupaten dan kota dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar pembanguan setiap wilayah dapat optimal, meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta hasil yang telah dicapai dapat dirasakan secara merata oleh penduduk Indonesia. Problematika utama pembangunan adalah masih ada beberapa daerah yang terisolasi sehingga menimbulkan persebaran penduduk yang tidak merata bahkan perkembanga sosial ekonomi masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan penduduk wilayah lain yang ada di Indonesia (Hermanto., 2009; Sarman & Sajogyo., 2000; Iek., 2013).

Negara berkembang dapat mewujudkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dengan melakukan pembangunan. Pembangunan yang kerap kali dilangsungkan oleh negara berkembang adalah pembangunan dalam bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses meningkatnya pendapatan total, yaitu terjadinya peristiwa pertumbuhan ekonomi pada suatu negara dengan memperkirakan penambahan jumlah penduduk, pergantian fundamental dalam susunan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Arsyad (2017) dalam Zakaria *et al (*2018) mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan kapasitas ekonomi nasional dimana kondisi ekonomi yang mu[illegible]nya cenderung relatif statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk dapat meningkatkan dan menjaga laju pertumbuhan GNP sampai memenuhi angka lima sampai tujuh persen. Todaro & Stephen (2006) dalam Fitri & Aimon (2019) juga menyatakan bahwa kesuksesan pembangunan ekonomi suatu negara dapat diukur berdasarkan tiga poin, yaitu berkembangnya kinerja penduduk untuk [illegible]ncukupi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), rasa harga diri yang meningkat (*self-esteem*) sebagai seorang manusia dan kemampuan penduduk untuk memilih (*freedom from servitudei*) yang merupakan salah satu HAM.

Isu utama dalam pembangunan wilayah terletak pada penekanan pendekatan kemajuan mengingat kualitas daerah yang bersangkutan dengan kemampuan sumber daya manusia, kelembagaan dan aktual lingkungan. Kemajuan keuangan teritorial harus, jelas, perlu membingkai fondasi baru, mendorong perusahaan pilihan, bekerja pada batas tenaga kerja saat ini untuk memberikan barang dan administrasi yang lebih baik, serta mendorong organisasi baru dan membedakan sektor bisnis baru. Pelatihan dalam bidang ekonomi yang berbeda membuat setiap daerah dan kota berlomba-lomba untuk mengembangkan potensi keuangannya, sehingga pembangunan provinsi dilakukan secara terpadu dan bersahabat serta terkoordinasi sehingga kemajuan yang terjadi di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan wilayahya.

Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah telah mengendalikan kemajuan masyarakat dalam mengalirkan perbaikan daerah yang memberikan daya adaptasi kepada daerah untuk membina daerahnya, mengingat kemajuan di bidang keuangan.

Perkembangan ekonomi dijadikan sebagai tolak ukur yang dapat digunakan untuk memutuskan pencapaian kemajuan suatu daerah dari berbagai bidang moneter yang secara implikasi menggambarkan tingkat perubahan moneter. Jadi diyakini bahwa tidak akan ada kerangka moneter yang berlaku di arena publik secara keseluruhan.

Pembangunan dalam bidang ekonomi yang diatur ke arah ini dapat menghadapi pergantian peristiwa keuangan daerah. Perbaikan keuangan daerah yang terjadi dapat diandalkan sebagai perputaran uang yang layak, di mana Pendapatan Nasional Bruto (PNB) perkapita asli (*steady cost*) harus lebih tinggi dari laju perkembangan penduduk. Sumartini & Muta'ali (2015) mengemukakan bahwa kemajuan keuangan daerah digambarkan oleh pembayaran per kapita yang tinggi dan stabil, pembangunan moneter teritorial serta efek samping dari perbaikan tersebut disebarluaskan secara merata di seluruh daerah sehingga semakin mempersempit kesenjangan antar daerah sehingga kemajuan dapat dianggap adil.

Pergantian peristiwa dan peningkatan daerah harus sesuai dengan keadaan dan tujuan pengembangan dan penciptaan wilayah lokal. Ketiadaan pemanfaatan aset yang ada secara ideal disebabkan oleh pelaksanaan kebutuhan kemajuan daerah yang tidak sesuai dengan potensi yang digerakan oleh setiap daerah. Pemenuhan kebutuhan daerah yang berbeda yang akan mendorong tingkat pemenuhan daerah sangat dipengaruhi oleh sifat administrasi yang diberikan oleh otoritas publik. Untuk mencapai hal ini, pentingnya gagasan kemajuan karena penataan harus ditujukan pada pengakuan fokus administrasi secara adil dan tidak memihak yang memerlukan metode-metode khusus yang sedang dikembangkan persiapannya. Strategi-strategi ini menggabungkan pemecahan perhitungan Pendapatan Perkapita Nominal (PPK Nominal), Pendapatan Perkapita Riil (PDB Riil), pembayaran perkapita, kegunaan sektoral, konstruksi keuangan teritorial, desain moneter sektoral dan laju pengembangan efisiensi moneter.

Mengusahakan produktivitas dan kecukupan porsi dan penggunaan aset dalam kegiatan daerah, serta agar tujuan perbaikan yang berbeda dan tujuan tercapai secara ideal memerlukan penilaian dalam sistem penataan sebagai bagian integral dari kemajuan wilayah. Evaluasi adalah mengumpulkan dan menyelidiki informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan latihan pengembangan lokal yang diatur. Selesai atau tidaknya penilaian bergantung pada informasi yang didapat selama tindakan. Melalui penilaian diperoleh keuntungan dan efek dari suatu tindakan kemajuan yang diharapkan dapat menentukan tujuan dan sasaran perbaikan yang telah dicapai, variabel pencapaian atau kekecewaan serta berbagai macam efek dari keuntungan selanjutnya yang diperlukan. sebagai data dan kontribusi untuk mengatur dan melaksanakan tambahan acara pergantian lokal.

Kabupaten Bondowoso adalah sebuah rezim yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah 1.569,10 km2 atau sekitar 3,26% dari luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur yang terbagi menjadi 23 sub-wilayah, 209 kota, dan 10 sub-lokal. Perkembangan keuangan Kabupaten Bondowoso telah berkembang di berbagai bidang, khususnya di pedesaan, usaha perakitan dan pengembangan (BPS Kabupaten Bondowoso Dalam Angka., 2020).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membuat artikel dengan judul "Analisis Ekonomi Wilayah dan Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso".

B. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Ekonomi Wilayah

Ekonomi wilayah (teritorial) adalah ekonomi yang berfokus pada perspektif spasial ke dalam penyelidikan keuangan. Urusan keuangan daerah terdiri dari perpaduan aspek keuangan konvensional

dengan hipotesis daerah yang memuat daerah-daerah yang akan menjadi hasil perekonomian daerah, khususnya pengelompokan antar daerah. Rencana pengaturan kemajuan keuangan provinsi untuk memberikan peluang bisnis yang luar biasa bagi penduduk dan mencapai ketergantungan keuangan lokal. Kemajuan keuangan akan bermanfaat dengan asumsi dapat mengatasi masalah dunia usaha termasuk wilayah, uang dan yayasan. Purwanti & Atmanti (2008) dalam Putra (2013) mengungkapkan bahwa teknik pengembangan keuangan wilayah secara komprehensif dikelompokkan menjadi empat, yaitu: (1) Strategi Pembangunan Fisik/Lokal; (2) Strategi Pengembangan Usaha; (3) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan (4) Strategi Pengembangan Wilayah Lokal.

Pendapatan wilayah adalah penanda prinsip yang digunakan untuk menentukan keadaan moneter suatu wilayah. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat ditentukan dari sudut pandang penciptaan, pembayaran dan penggunaan. Pendekatan perhitungan dengan cermat memberikan ukuran penggunaan yang serupa dengan ukuran terakhir tenaga kerja dan produk yang dibuat dan harus memberikan hasil yang serupa dengan pembayaran habis-habisan dari elemen-elemen penciptaan.

Kabupaten Bondowoso adalah sebuah pemerintahan yang terletak di bagian timur Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah Kabupaten Bondowoso adalah 1.569,10 km^2 atau sekitar 3,26% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur yang terisolir menjadi 23 sub wilayah, 209 kota, dan 10 kecamatan. Perkembangan keuangan Kabupaten Bondowoso telah berkembang di berbagai bidang, khususnya di pedesaan, usaha perakitan dan pengembangan

2.2 Dampak Pembangunan Ekonomi

Perbaikan keuangan dipengaruhi oleh variabel moneter dan non moneter yang dapat berdampak positif dan merugikan. Efek positif dari perbaikan keuangan adalah dapat membuat pelaksanaan latihan moneter berjalan seperti yang diharapkan, meningkatkan jalannya pembangunan moneter dan menjadikan pekerjaan sebagai jawaban untuk mengurangi tingkat pengangguran. Sementara itu, akibat buruk dari perbaikan moneter adalah munculnya kerusakan alam, misalnya pencemaran tanah, air dan udara karena pengaturan pembangunan yang tidak berdaya. Kemajuan pada umumnya akan menumbuhkan pergantian peristiwa modern dan pengaruh tanah pedesaan menjadi berkurang.

C. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian dan Gambaran dari Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan *mix method*, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang mengahasilkan data deskriptif dalam bentuk tertulis atau lisan dari orang yang dapat diamati (Hardiyanto, 2020). Penggunaan metode kualitatif pada penelitian ini didasari pada tujuan yang ingin dicapai, yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai analisis ekonomi wilayah dan evaluasi dampak pembangunan ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Metode kuantitatif ingin Kondisi ekonomi wilayah di Kabupaten Bondowoso.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber data resmi yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan beberapa rumus terkait analisis ekonomi wilayah dan evalusi dampak pembangunan

ekonomi. Hal ini dilakukan peneliti dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Kabupaten Bondowoso serta mengolah data yang ada dan melakukan analisis terkait data tersebut.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Ekonomi Wilayah di Kabupaten Bondowoso

a. Pendapatan Perkapita

Rumus:

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Total Jlh Penduduk}}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Pendapatan Perkapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 2.568.519.528. Pendapatan perkapita merupakan salah satu komponen untuk menentukan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita berasal dari pendapatan dari suatu tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara. Apabila masyarakat mendapatkan penghasilan yang besar, maka masyarakat akan dapat menghidupi kehidupannya dan menempatkan untuk kebutuhannya di masa mendatang. Namun, jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan maka masyarakat akan sulit menghidupi kebutuhan hidup.

b. Produktivitas Sektoral

Rumus:

$$\text{Produktivitas Sektoral (i)} = \frac{\text{PDRBsi}}{\text{JPsi}}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Produktivitas Sektoral Industri Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 3.528.878.038. Laju produktivitas sektoral di Kabupaten Bondowoso mengalami peningkatan dan perunan dari tahun ke tahun. Meningkatnya laju PDRB diharapkan dapat menjadi solusi atas ketimpangan pendapatan sebab pembangunan ekonomi suatu wilayah merupakan faktor penting dalam ketimpangan pendapatan.

c. Struktur Perekonomian

Rumus Struktur Perekonomian Regional:

$$\text{PDB Kabupaten } i_t = \frac{\text{PDB } i_t}{\sum \text{PDB } i_t} \times 100$$

Rumus Struktur Perekonomian Sektoral:

$$\text{PDB Kabupaten } i_t = \frac{\text{PDB } i_t}{\sum \text{PDB } i_t} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Struktur Perekonomian Regional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 83.529.596,88 dan Struktur Perekonomian Sektoral (Industri) Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 1.770.139.754. Struktur perekonomian dalam PDRB adalah unsur penting agar dapat mengetahui kondisi ekonomi Kabupaten Bondowoso yang ditunjukkan dengan data PDB, sehingga didapatkan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dan dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang berpotensi besar ataupun sektor-sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh di Kabupaten Bondowoso pada masa mendatang.

4.2 Laju Pertumbuhan Produktivitas Ekonomi

Rumus:

$$\text{LPPK} = \text{LPE} - \text{LPP}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Laju Pertumbuhan Produktivitas Ekonomi Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar -1,88%. Laju pertumbuhan produktivitas ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penduduk, luas tanah atau lahan, jumlah barang modal dan sumber daya alam serta teknologi. Produktivitas suatu wilayah secara ideal akan meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak positif pada kemakmuran masyarakat.

a) Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso

1. Nilai Pengaruh Nilai Tambah Nasional Terhadap Regional

Rumus:

$$N_{pi} = \sum p_{it} \times \left(\frac{P_{it}}{P_{io}}\right)$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Nilai Pengaruh Nilai Tambah Nasional Terhadap Regional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 19.486,77 miliar rupiah.

2. Nilai Pengaruh Kesempatan Kerja Nasional

Rumus:

$$E_{ki} = \sum e_{it} \times \left(\frac{E_{it}}{E_{io}}\right)$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Nilai Pengaruh Kesempatan Kerja Nasional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 76.017,36 juta orang.

3. Peningkatan Nilai Tambah (PDRB) Akibat Kebijakan Regional

Rumus:

$$P_i = A_i - N_{pi}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Peningkatan Nilai Tambah (PDRB) Akibat Kebijakan Regional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 3.538.196,23 miliar rupiah.

4. Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Kebijakan Regional

Rumus:

$$E_i = K_i - E_{ki}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Peningkatan Kesempatan Kerja Akibat Kebijakan Regional Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 yaitu sebesar 402.000,64 juta orang.

Perkembangan ekonomi adalah salah satu petunjuk dalam kemajuan keuangan yang harus terlihat melalui peningkatan pembayaran teritorial asli selama jangka waktu tertentu. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan penanda yang signifikan untuk menentukan keadaan keuangan dalam ruang dalam jangka waktu tertentu, baik berdasarkan biaya saat ini maupun berdasarkan biaya tetap. PDRB pada dasarnya adalah seberapa besar nilai tambah yang diciptakan oleh semua area di wilayah tertentu atau merupakan nilai absolut dari tenaga kerja dan produk tertentu yang diberikan oleh semua unit keuangan di sebuah wilayah. Ketahanan ekonomi pada masa mendatang dicerminkan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Kumalawati *et al*., 2020)

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu aturan di wilayah tapal kuda. Daerah tapal kuda merupakan wilayah yang terdiri dari satu kota dan tujuh aturan, antara lain Kota Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Situbondo. Berbeda dengan tujuh aturan di wilayah tapal kuda, perkembangan moneter Kabupaten Bondowoso melebihi Kabupaten Probolinggo.

Total PDRB atas biaya Kabupaten Bondowoso saat ini pada tahun 2019 secara langsung adalah 19,87 triliun rupiah. Sementara itu, PDRB dengan biaya tetap pada tahun 2019 sebesar Rp 13,64 triliun. Perkembangan moneter Kabupaten Bondowoso pada tahun 2019 sebesar 5,29% dan mengalami percepatan berbanding terbalik dengan tahun 2018 yang sebesar 5,10%. Perkembangan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2019 di bidang industri sebesar 8,62% (BPS Statistik Kabupaten Bondowoso, 2020).

4.3 Pendapatan Perkapita Nominal (PPK Nominal)

Pendapatan perkapita adalah seluruh pendapatan yang bersumber dari negara dalam jangka waktu satu tahun dan bentuknya berupa uang yang akan dibagi dengan rata penduduk. PPK memiliki peran yang penting sebagai indikator perekonomian, terutama dalam hal kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu negara. PPK harus dihitung karena tanpa mengetahui angka pasti tersebut tentunya pihak pemerintah akan mengalami

kesulitan untuk mengetahui tolak ukur kondisi perekonomian pada suatu negara (Sukirno., 2004 dalam Mahendra., 2016). Pendapatan perkapita merupakan rata-rata pendapatan yang diperoleh penduduk di suatu daerah atau negara. Pendapatan perkapita digunakan untuk mengetahui keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi (Rapanna & Sukarno., 2017).Rumus:

$$\text{PPK Nominal} = \frac{\text{PNB}}{\text{Total Jumlah Penduduk}}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Pendapatan Perkapita Nominal (PPK Nominal) Negara Indonesia Tahun 2020 yaitu sebesar 55.168.550.

4.4 Pendapatan Perkapita Riil (PDB Riil)

Produk domestik bruto riil adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam perekonomian dan diukur dengan harga konstan. PDB riil perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata yang diterima oleh penduduk Indonesia dan juga merupakan konsep yang dipakai sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk Indonesia (Zalukhu *et* al., 2021). Perhitungan PDB Riil didasari oleh harga tetap yang berlaku di periode tertentu.
Rumus:

$$\text{PDB Riil} = \frac{\text{PNB (Konstan)}}{\text{Total Jumlah Penduduk}}$$

Berdasarkan perhitungan didapatkan hasil Pendapatan Perkapita Riil (PDB Riil) Negara Indonesia Tahun 2020 yaitu sebesar 55.168.550. Pendapatan perkapita di Negara Indonesia masih tergolong rendah dan tercatat masih jauh tertinggal dari negara tetangga.

E. KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi suatu daerah tidak terlepas dari daerah sekitarnya, wilayah sebagai subsistem spasial dalam lingkup yang lebih luas. Kabupaten ataupun kota perlu memperhatikan perkembangan wilayah sekitarnya. Sebagian besar tingkat perkembangan ekonomi di Kabupaten Bondowoso adalah relatif meningkat meskipun memiliki pendapatan perkapita yang tergolong sedang. Sektor industri yang sekaligus penyumbang pendapatan terbesar di Kabupaten Bondowoso perlu dikembangkan dan dikelola kembali agar dapat memenuhi capaian dan sasaran pembangunan ekonomi.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rosalina Kumalawati, M. Sc, Ibu Dr. Ellyn Normelani, M. Pd., M. S dan Bapak Prof. Dr. Ahmad Alim Bachri, SE., M. Si selaku dosen pengampu mata kuliah Geografi Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dalam proses pembuatan artikel. Serta rekan-rekan satu angkatan Program Studi Geografi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel.

REFERENSI

Arsyad, L. 2017. *Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi*.

Azizah, N. A., Riadi, S., & Nugroho, A. R. 2021. Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Semangat Dalam Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, *2*(1), 21–34.

BPS Kabupaten Bondowoso Dalam Angka. 2020. *BPS Kabupaten Bondowoso Dalam Angka 2020*.

BPS Statistik Kabupaten Bondowoso. 2020. *BPS Statistik Kabupaten Bondowoso 2020*.

Fitri, L. M., & Aimon, H. 2019. Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, *1*(3), 769–780.

Hardiyanto, F. 2020. Analisis Marketing

Syariah dalam Menghadapi COVID 19 (Studi Kasus ARPI Hijab Kuningan). *Jurnal Syantax Admiration*, *1*(1), 23–32.

Hermanto, D. 2009. *Arah dan Kinerja Investasi Bidang Jalan*.

Iek, M. 2013. Analisis Dampak Pembangunan Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Pedalaman May Brat Provinsi Papua Barat (Studi Kasus di Distrik Ayamaru, Aitinyo dan Aifat. *Jurnal Ekonomi Dan Kuantitatif Terapan*, *6*(1), 30–40.

Kumalawati, R., Nasruddin, N., Murliawan, K. H., & Anggraini, R. N. 2020. Potensi Sektor Pertanian untuk Pengembangan Wilayah di Kabupaten Balanga. *Jurnal Geografika (Geografi Lingkungan Lahan Basah)*, *1*(2), 1–5.

Mahendra, A. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita, Inflasi dan Pengangguran terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan (JRAK*, *2*(2), 123–148.

Nuryadin, D., & Suharsih, S. 2017. Analisis dan Evaluasi Dampak Dana Alokasi Khusus Terhadap Indikator Kinerja Pembangunan di Daerah Studi Kasus Kabupaten-Kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, *18*(1), 62–70.

Purwanti, E, Y., & Atmanti, H, D. 2008. Analisis Sektor dan Produk Unggulan Kabupaten Kendal. *Jurnal Media Ekonomi Dan Manajemen*, *18*(2), 165–177.

Putra, A, N. 2013. *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota di Provinsi Daaerah Istimewa Yogyakarta*.

Rapanna, P., & Sukarno, Z. 2017. *Ekonomi Pembangunan*.

Sarman, M., & S. 2000. *Masalah Penanggulanagan Kemiskinan Refleksi dari Kawasan Timur Indonesia Cetakan ke-1*. 10.

Sukirno, S. 2004. *Makroekonomi Teori Pengantar*. Raja Grafindo Persada.

Sumartini., & Muta'ali, L. 2015. Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Bantul. *Jurnal Bumi Indonesia*, *4*(4).

Suryahani, I., & Murni, S. 2006. Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Eko-Regional*, *1*(1), 31–37.

Todaro, M. P., & S. C. S. 2006. *Pembangunan Ekonomi Jilid 2 Edisi Kesembilan*. Erlangga.

Zakaria., Zulham, T., & Gunawan, E. 2018. Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten AcehBbesar. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, *4*(1), 44–55.

Zalukhu, J., Sihotang, J., & Purba, M. L. 2021. Analisis Pengaruh PDB Riil Per Kapita, Inflasi dan Tingkat Suku Bunga terhadap Jumlah Deposito Berjangka pada Bank Umum (Bank Persero) di Indonesia Tahun 2005-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *02*(01), 61–70.

Analisis Ekonomi Wilayah Dan Evaluasi Dampak Pembangunan Ekonomi di Kabupaten Bondowoso

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	2%	%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	123dok.com Internet Source	3%
2	ppjp.ulm.ac.id Internet Source	2%
3	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	1%
4	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	www.coursehero.com Internet Source	1%
6	repository.uhn.ac.id Internet Source	1%
7	cerdasco.com Internet Source	1%
8	www.scribd.com Internet Source	1%
9	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

10	pt.scribd.com Internet Source	1 %
11	adoc.pub Internet Source	1 %

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 1%
Exclude bibliography	On		